

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KEAKSARAAN DI KABUPATEN MAROS

M. Ali Latif

Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Jurusan PLS

Email: alilatif@unm.ac.id

ABSTRACT

The study aims to determine the picture of the implementation of literacy education in Maros district, seen in terms of planning, organizing, implementing learning, coordination, coaching and assessment as well as learning outcomes of learning residents. This research is a type of case study by using a combination of qualitative and quantitative research approaches. Based on the results of the data analysis, conclusions were drawn (1) The literacy education program in Maros district has been implemented through a series of planning, organizing, implementing learning, coordination, coaching and assessment, as well as meeting basic literacy education standards, (2) the literacy education program is supported by the ranks of level II local governments, private institutions and illiterate citizens. In addition, there are still obstacles such as the slowness of disbursement of organizing funds from the government, the lack of tutoring in teaching citizens to learn and the lack of activity of citizens learning to participate in learning. (3) Learning outcomes in the form of literacy ability achieved by residents learning literacy education are more at a high level of achievement, in other words, that the literacy education program has succeeded in liberating illiteracy for illiteracy residents in Maros district

Keywords: Implementation, Education, Literacy

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui gambaran implementasi pendidikan keaksaraan di kabupaten Maros, dilihat dari sisi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan pembelajaran, koordinasi, pembinaan dan penilaian serta hasil belajar warga belajar. Penelitian ini termasuk jenis studi kasus dengan menggunakan pendekatan kombinasi penelitian kualitatif dan kuantitatif. Berdasarkan hasil analisis data ditarik kesimpulan (1) Program pendidikan keaksaraan di kabupaten Maros telah dilaksanakan melalui rangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan pembelajaran, koordinasi, pembinaan dan penilaian, serta memenuhi standar pendidikan keaksaraan dasar, (2) Program Pendidikan keaksaraan didukung oleh jajaran pemerintah daerah tingkat II, lembaga swasta dan warga buta aksara. Selain itu, masih memiliki kendala seperti keterlambatan pencairan dana penyelenggaraan dari pemerintah, kurang kemampuan tutor membelajarkan warga belajar dan kurang aktifan warga belajar mengikuti pembelajaran. (3) Hasil belajar berupa kemampuan keaksaraan yang dicapai warga belajar pendidikan keaksaraan lebih banyak berada pada tingkat capaian tinggi, dengan kata lain bahwa program pendidikan keaksaraan telah berhasil membebaskan buta aksara bagi warga buta aksara di kabupaten Maros

Kata kunci: Implementasi, Pendidikan, Keaksaraan.

PENDAHULUAN

Penduduk yang mengalami buta aksara merupakan penghambat baginya untuk bisa menerima informasi dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap positifnya. Akibatnya, mereka tidak mampu beradaptasi dan berkompetisi untuk bisa bangkit dari himpitan kemiskinan, kebodohan dalam kehidupannya. Oleh karena itu, setiap penduduk perlu memiliki kemampuan keaksaraan, yang memungkinkan seseorang untuk secara terus menerus mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap positifnya, sehingga dapat beradaptasi dan bertahan dalam situasi yang senantiasa mengalami perubahan dan persaingan.

Tujuan nasional yang secara eksplisit tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Dalam rangka itulah tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pandangan idealistik ini mendasari pentingnya pendidikan dalam kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, maka ditempuh tiga jalur pendidikan, yaitu pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal.

Komitmen nasional yang secara tegas terformulasi dalam UUD 1945 dan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, diikuti dengan instruksi Presiden nomor 5 tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA).

Dalam merealisasikan komitmen nasional tersebut, maka pada jalur pendidikan nonformal, melalui prakarsa keaksaraan untuk pemberdayaan masyarakat. Departemen Pendidikan Nasional melalui Direktorat Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal sejak tahun 2009 menyediakan layanan program pendidikan keaksaraan dasar yang merupakan program pemberantasan buta aksara maupun menu ragam keaksaraan lainnya yang merupakan program pemeliharaan dan peningkatan kemampuan keaksaraan.

Kabupaten Maros, sebagai salah satu kabupaten di Propinsi Sulawesi Selatan masih terdapat 1.052 warga buta aksara, yang tersebar di 10 kecamatan (Juni 2020). Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Maros telah melaksanakan pembebasan buta aksara sebanyak 300 warga belajar. Program pembebasan buta aksara melalui pendidikan keaksaraan fungsional dilaksanakan untuk mengurangi angka buta aksara, dengan biaya yang dikucurkan dari anggaran Pemerintah Daerah Tingkat I dan Tingkat II. Namun diduga program ini masih mengalami kendala teknis dan operasional di tingkat penyelenggara program dan kelompok belajar, yang dapat berakibat kurang berhasil program pembebasan buta aksara tersebut.

Hasil penelitian oleh Lembaga Swadaya Masyarakat kerjasama Ditjen PAUDNI Kemdiknas (2010) menemukan bahwa dari 3.048 orang luaran program pendidikan

keaksaraan yang tersebar di tujuh kabupaten Propinsi Sulawesi Selatan, termasuk kabupaten Maros, terdapat 54 % yang belum tuntas atau belum melek aksara, artinya luaran program tersebut harus mengulang kembali pendidikannya pada tahun berikutnya. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena program pembebasan buta aksara melalui pendidikan keaksaraan setiap tahun banyak menghabiskan biaya tetapi kurang berhasil.

Keberhasilan program pendidikan keaksaraan harus ditunjang oleh berbagai faktor, antara lain rekrutmen dan penyiapan warga belajar, keterlibatan tenaga pendidik/tutor, kurikulum, sarana dan prasarana, proses penilaian, koordinasi dan pengendalian program. Motivasi belajar warga belajar juga ikut menentukan terhadap keterlibatan dan partisipasinya dalam mengikuti kegiatan pendidikan keaksaraan. Dari semua faktor yang telah disebutkan, nampaknya tertuju kepada implementasi program pendidikan keaksaraan yang mengarah kepada pengelolaan meliputi unsur perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan pembelajaran, koordinasi, pembinaan, dan penilaian.

Program pendidikan keaksaraan yang diselenggarakan diharapkan berhasil membebaskan buta aksara, namun dengan berbagai hal dapat menjadi faktor penyebab kurang berhasilnya. Masalah pokok yang hendak dikaji secara mendalam dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah gambaran implementasi program pendidikan keaksaraan di Kabupaten Maros dan

(2) Apakah pendidikan keaksaraan telah berhasil membebaskan warga buta aksara di Kabupaten Maros ?

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan tentang kondisi riil implementasi pendidikan keaksaraan, dilihat dari sisi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan pembelajaran, koordinasi, pembinaan dan penilaian; sehingga dapat dijadikan masukan dalam pembenahan dan penyempurnaan program pendidikan keaksaraan yang akan dilaksanakan selanjutnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan prosedur penelitian studi kasus dengan pendekatan gabungan, yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan kondisi aktual implementasi program pendidikan keaksaraan; dan pendekatan kuantitatif digunakan untuk memperoleh data tentang tingkat kompetensi keaksaraan atau penguasaan warga belajar terhadap materi pendidikan keaksaraan.

Implementasi program pendidikan keaksaraan yang akan diteliti meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan pembelajaran, koordinasi, pembinaan, dan penilaian. Subjek penelitian diklasifikasi menjadi dua, yaitu (1)

Pada kegiatan survei untuk mendapatkan data/ informasi yang terkait dengan implementasi program pendidikan keaksaraan, dilakukan kepada warga buta aksara, tutor, tokoh masyarakat, dan pemimpin formal setempat, pegawai dalam

jajaran Dinas Pendidikan, terutama yang bertugas menangani program pendidikan keaksaraan. (2) Pada kegiatan pengumpulan data untuk mengetahui kompetensi keaksaraan yang telah dicapai peserta program pendidikan keaksaraan, dilakukan kepada 250 peserta (warga belajar) program pendidikan keaksaraan tahun 2020.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Maros Propinsi Sulawesi Selatan. Instrumen yang dipakai dalam pengumpulan data: (1) Pedoman observasi, digunakan untuk mendapatkan data/ informasi yang berkaitan dengan keadaan dan kondisi lokasi dan tempat pembelajaran dari program pendidikan keaksaraan, (2) Pedoman wawancara, digunakan untuk mendapatkan data/ informasi yang berkaitan dengan implementasi program pembebasan buta aksara (wawancara dan observasi saling melengkapi), (3) Dokumen, dipakai untuk menjangkau data/ informasi tentang keberadaan warga belajar pendidikan keaksaraan yang menjadi sasaran tahun 2020, dan (4) Test, digunakan untuk mengukur perolehan belajar (kemampuan keaksaraan dasar) warga belajar, dikembangkan sesuai dengan materi keaksaraan (calistung). Kemampuan keaksaraan dasar diukur dengan menggunakan test kemampuan keaksaraan dengan mengacu pada standar kompetensi keaksaraan dasar (SKKD), yang dikeluarkan Direktorat Pendidikan Masyarakat Kemendikbud.

Metode analisis data untuk implementasi program pendidikan keaksaraan dilakukan dengan cara: (1) reduksi data, (2) penyajian data,

dan (3) verifikasi atau penarikan kesimpulan. Sedangkan data tentang tingkat kompetensi keaksaraan dasar dari warga belajar dilakukan dengan cara deskriptif (persentase dan rerata). Test kemampuan keaksaraan dasar memiliki 29 butir pertanyaan dengan skor nilai tertinggi 92 jika semua butir soal dijawab dengan benar. Tingkat kemampuan keaksaraan dasar warga belajar, ditetapkan melalui tiga kategori yaitu tinggi, sedang dan rendah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program pendidikan keaksaraan yang akan dilaksanakan setiap tahun diawali dengan membuat perencanaan, yang memuat tentang jumlah dan syarat warga belajar yang akan dilayani, cara rekrutmen dan penetapannya. Tahun 2020 jumlah warga belajar yang dilayani oleh Pemda Maros (Dinas Pendidikan) sebanyak 300 warga belajar, ditetapkan dengan syarat (1) warga masyarakat yang buta aksara murni dan drop out paling tinggi kelas tiga Sekolah Dasar yang Buta aksara kembali, (2) usia prioritas antara 13 hingga 44 tahun, (3) bersedia mengikuti pembelajaran. Sebelum warga buta aksara dibelajarkan maka tutor melakukan identifikasi/ pendataan calon warga belajar di wilayahnya masing-masing, selanjutnya tutor bersama penyelenggara membuat proposal untuk diteruskan ke pihak Bidang PLS Dinas Pendidikan untuk mendapatkan persetujuan beserta pendanaannya. Mengenai tutor yang ditugaskan membelajarkan warga belajar di kelompok belajar direkrut oleh penyelenggara, dengan syarat (1) warga masyarakat berpendidikan

minimal SLTA, (2) berdomisili di sekitar sasaran warga belajar buta aksara, (3) bersedia mengikuti pelatihan/ bimbingan tentang tatacara membelajarkan warga buta aksara, dan (4) bersedia membelajarkan warga belajar.

Unsur-unsur yang terlibat dalam terselenggaranya program pendidikan keaksaraan, mulai tingkat kabupaten sampai ke tingkat paling bawah di penyelenggara/ kelompok belajar dapat dikemukakan: di tingkat kabupaten dipimpin oleh kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), tugasnya adalah merencanakan sasaran program tahunan, mengkoordinir dan membina program pendidikan keaksaraan di wilayah kerja kabupaten. Seksi Pendidikan Masyarakat (Dikmas) yang merupakan salah satu seksi di bawah Bidang PLS, bertugas dan bertanggung jawab langsung dalam pembinaan dan penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan di tingkat kabupaten. Di tingkat kecamatan, dikenal Penilik Pendidikan Masyarakat (Dikmas), yang bertugas langsung melakukan pembinaan manajemen dan administrasi bagi para penyelenggara program dan tutor di wilayah kerja kecamatan masing-masing. Lembaga/ organisasi selaku penyelenggara program pendidikan keaksaraan di masyarakat, bertugas mendata, menghimpun dan memfasilitasi terselenggaranya proses pembelajaran keaksaraan oleh para tutor. Lembaga/ organisasi yang dimaksud ada dari unsur pemerintah adapula dari kalangan non pemerintah. Dari unsur pemerintah adalah Sanggar Kegiatan Belajar

(SKB), dari unsur non pemerintah seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Majelis Taklim dan perorangan. Penetapan tempat berlangsungnya pembelajaran menjadi tugas dan wewenang dari lembaga/ organisasi tertentu seperti telah disebutkan sebelumnya. Hal ini, dilakukan karena salah satu syarat lembaga dapat menerima pembiayaan dan menjadi penyelenggara program pendidikan keaksaraan, jika padanya tersedia tempat pembelajaran yang memadai.

Dalam proses pembelajaran menggunakan kurikulum keaksaraan dasar yang dirujuk dari kurikulum yang telah ditetapkan oleh Direktorat Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada kurikulum tersebut, memiliki standar kompetensi yang diinginkan, yaitu kemampuan membaca dasar, kemampuan menulis dasar, kemampuan berhitung dasar, kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Dalam penyajian materi keaksaraan kepada warga belajar, tutor diberikan keleluasaan untuk mengembangkan materi sesuai kebutuhan dan potensi lingkungan warga belajar. Pembelajaran melalui tatap muka antara tutor dan warga belajar dilaksanakan dua kali seminggu. Tiap kali pertemuan menggunakan waktu antara 2 – 3 jam.

Koordinasi dilakukan untuk menciptakan dan memelihara jaringan kerjasama beberapa unsur terkait dengan penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan, dilakukan dengan tujuan saling memperkuat melalui pertukaran informasi atau bekerjasama dalam

penyelenggaraan pendidikan keaksaraan. Unsur-unsur terkait yang dimaksud, menurut Kabid PLS Maros adalah (1) Seksi Pendidikan Masyarakat, (2) organisasi mitra penyelenggara program pendidikan keaksaraan, seperti SKB, PKBM, dan Majelis Taklim. Kegiatan Koordinasi dilaksanakan dalam rapat tahunan, di awal tahun dan di akhir tahun. Pada rapat awal tahun dibicarakan tentang pembagian kuota sasaran, penyusunan dan penyampaian proposal program, dan lokasi yang menjadi prioritas diselenggarakan program pendidikan keaksaraan. Sedangkan rapat akhir tahun dibicarakan tentang keberhasilan, daya dukung dan kendala yang dialami selama menyelenggarakan program sepanjang tahun berjalan. Cara koordinasi lain, dilakukan dengan persuratan dari Kepala bidang PLS kabupaten Maros, dan laporan perkembangan penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan, biasanya dilaksanakan saat pembelajaran keaksaraan berlangsung. Kegiatan koordinasi dilaksanakan baik terjadwal maupun insidental.

Dalam kegiatan Pembinaan dilaksanakan secara berjenjang menurut tugas dan fungsi serta kewenangan dari masing-masing aparat pembina. Unsur pembina di tingkat kabupaten (Kabid PLS/ Seksi Dikmas) melakukan pembinaan kepada para penilik Dikmas, dalam upaya memberikan penguatan dan menambah kompetensi sebagai pembina pendidikan nonformal (Pendidikan Keaksaraan) di wilayah kecamatan binaannya. Hal ini dilakukan di awal tahun, dengan cara

melakukan rapat tahunan kabupaten, rapat terprogram dan insidental jika ada kebijakan penting yang ingin dikomunikasikan kepada para Penilik Dikmas. Pembinaan dilakukan oleh aparat di tingkat kabupaten langsung ke organisasi/ lembaga penyelenggara program, dalam hal ini melalui kegiatan monitoring, dilaksanakan saat program pendidikan keaksaraan sedang berlangsung.

Penilaian dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui keberhasilan program pendidikan keaksaraan dan tingkat penguasaan materi keaksaraan oleh warga belajar. Indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan program pendidikan keaksaraan di kabupaten Maros adalah (1) terselenggaranya pembelajaran keaksaraan pada semua warga belajar yang telah direncanakan, (2) terealisasinya anggaran program pendidikan keaksaraan dari dana APBD I dan APBD II. Dan (3) warga belajar yang telah dibelajarkan telah melek aksara (terbebas dari buta aksara). Penilaian terhadap program pendidikan keaksaraan dilakukan saat rapat akhir tahun dengan para Penilik Dikmas dan Penyelenggara program pendidikan keaksaraan. Juga ditelaah dari laporan tahunan yang dibuat oleh lembaga/ organisasi penyelenggara program. Mengenai penilaian tentang kemampuan keaksaraan warga belajar yang telah dibelajarkan selama priode tahun 2020, dilakukan penilaian dengan cara melakukan tes kemampuan keaksaraan dasar oleh para tutor yang bertugas.

Dalam implementasi program pendidikan keaksaraan telah

mendapat dukungan dari berbagai pihak: (1) Kebijakan Pemerintah kabupaten Maros, mendukung pendidikan nonformal (termasuk pendidikan keaksaraan), melalui kebijakan/ penegasan Kepala Dinas Pendidikan, untuk membebaskan warga buta aksara di wilayahnya. (2) Dukungan dana yang telah dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Maros, cukup memberikan stimulan pembiayaan terhadap penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan. (3) Komitmen Kepala Bidang PLS dan jajarannya untuk terus mencari kantong-kantong wilayah yang masih terdapat warga buta aksara untuk dijadikan prioritas sasaran pembebasan buta aksara, dan senantiasa memperbaiki penyelenggaraan/ layanan pendidikan keaksaraan. (4) Organisasi/ lembaga selaku penyelenggara program pendidikan keaksaraan terus memberikan dukungan dan partisipasinya dalam terselenggaranya pendidikan keaksaraan.

Selain mendapatkan dukungan, juga masih ditemukan beberapa kendala atau faktor penghambat: (1) dana yang dikucurkan ke lembaga/organisasi penyelenggara program pendidikan keaksaraan kadang-kadang terlambat (akhir bulan juli), sehingga pembiayaan operasional program terlambat pula, mengakibatkan lambatnya dimulai pembelajaran di kelompok belajar, yang berdampak terhadap hasil belajar warga belajar. (2) Pelaporan penyelenggaraan program pembelajaran keaksaraan harus disampaikan ke pihak Kabupaten sebelum bulan Desember, sehingga

kadang-kadang proses pembelajaran belum tuntas (warga belum melek aksara). Hal ini akan mempengaruhi tingkat capaian keberhasilan program pendidikan keaksaraan, jika dilihat dari sisi hasil belajar yang dicapai warga belajar. (3) Tutor yang bertugas membelajarkan warga belajar sebagian belum menguasai strategi dan pendekatan pembelajaran orang dewasa, dimana banyak digunakan dalam melayani warga belajar buta aksara yang pada umumnya termasuk orang dewasa. (4) Sebagian warga belajar buta aksara yang dibelajarkan dalam kelompok belajar, kurang bersemangat/ berminat mengikuti pembelajaran, kadang-kadang mereka hanya datang tatap muka 3 hingga 5 kali saja, selanjutnya mereka tidak datang lagi.

Bedasarkan hasil tes kemampuan keaksaraan dasar yang dilakukan pada 250 warga belajar yang telah mengikuti proses pembelajaran sejak bulan Mei 2020, diperoleh bahwa tingkat kemampuan keaksaraan dasar yang dicapai warga belajar terbanyak (61,60 %) berada pada tingkat keaksaraan yang tinggi, kemudian 28,00 % berada pada tingkat keaksaraan sedang, sedangkan sisanya (10,40 %) berada pada tingkat keaksaraan rendah.

Untuk menjadikan perencanaan program sebagai panduan dan penentu arah terselenggaranya program pendidikan keaksaraan di masyarakat, maka data sasaran (warga masyarakat buta aksara) yang memenuhi syarat, jauh lebih baik jika disiapkan lebih awal, dibandingkan kalau disiapkan secara tergesa-gesa, dan tidak teliti, karena dapat

berakibat sasaran akan berulang dari tahun sebelumnya atau sasaran tidak memenuhi syarat. Tutor yang ditugaskan membelajarkan warga belajar, sekalipun sudah direkrut dari warga masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan, akan tetapi tutor tersebut harus diberi penguatan dan tambahan pengetahuan/keterampilan dibidang metode, teknik dan pendekatan pembelajaran orang dewasa, karena warga belajar yang dibelajarkan pada umumnya termasuk orang dewasa.

Tidak seorangpun perencana pemberantasan buta aksara mengetahui secara pasti, berapa sebenarnya jumlah buta aksara pada jenjang usia tertentu, bagaimana penyebarannya, berapa tenaga yang mampu, mau dan siap untuk membelajarkan, apa sarana yang tersedia dan berapa jumlahnya. Berapa biaya satuan yang mampu untuk mendukung proses belajar, metode apa yang disenangi calon warga belajar, bagaimana kemauan dan kesiapan warga belajar. Berapa lama waktu yang diperlukan agar mereka melek aksara, dimana kegiatan belajar akan dilakukan, bagaimana organisasi pelaksanaan kegiatan belajar, bagaimana ukuran atau indikator keberhasilan program. Pertanyaan-pertanyaan sebagaimana yang telah disebutkan harus terjawab dan disiapkan data/informasinya, agar perencanaan yang dibuat memenuhi standar perencanaan yang baik, layak dan siap untuk diimplementasikan. Guna menemukan data/informasi yang dibutuhkan dalam perencanaan dibutuhkan berbagai kegiatan pra perencanaan, antara lain pendataan sasaran kegiatan, pendataan

sumberdaya manusia potensial selaku pelaku/ penyelenggara program dan pelaksana pembelajaran, serta pendataan fasilitas yang dapat menunjang kegiatan, baik dalam pengelolaan maupun pada proses pembelajaran.

Organisasi penyelenggara program pendidikan keaksaraan, nampaknya menggunakan struktur menetap ditingkat kabupaten dan kecamatan, namun di tingkat penyelenggara program menggunakan struktur organisasi yang bervariasi, namun berdasarkan observasi dari beberapa lembaga penyelenggara program yang ada, ditemukan bahwa, pada lembaga tersebut terdapat unsur-unsur: (1) ketua penyelenggara program, (2) sekretaris, (3) seksi program pendidikan keaksaraan, (4) tutor, dan (5) kelompok belajar. Disetiap kelompok belajar ada ketua kelompok dan anggota/ warga belajar, dimana ketua kelompok merangkap sebagai warga belajar. Gambaran tentang organisasi penyelenggaraan pendidikan keaksaraan di kabupaten Maros, telah menunjukkan bahwa pendidikan keaksaraan berlangsung bukan merupakan program coba-coba, tetapi merupakan program yang sudah melembaga dan mendapat perhatian dari pemerintah dan warga masyarakat. Hal ini dibuktikan bahwa bahwa penyelenggaraannya melibatkan pihak pemerintah dan non pemerintah.

Proses pembelajaran di kelompok belajar, nampaknya masih ditemukan ada yang kurang berjalan lancar sesuai jadwal yang dirancang sebelumnya, yaitu dapat diselesaikan

dalam 120 jam pelajaran @ 60 menit. Apabila proses pembelajaran dilakukan 4-6 jam pelajaran perminggu, maka 120 jam pelajaran ini, akan dapat diselesaikan dalam jangka waktu 4 sampai dengan 7,5 bulan. Apabila proses pembelajaran dilakukan 4-6 jam pelajaran perminggu, maka 120 jam pelajaran ini, akan dapat diselesaikan dalam jangka waktu 4 sampai dengan 7,5 bulan. Beberapa proses pembelajaran di kelompok belajar ada yang tidak maksimal jumlah kegiatan tatap muka berlangsung antara tutor dan warga belajar, hingga akhir tahun 2020.

Tutor sebagai ujung tombak dalam mentransfer ilmu dan membantu proses pemahaman materi keaksaraan kepada warga belajar, mestinya menguasai sejumlah metode dan teknik pembelajaran orang dewasa, namun masih ada tutor yang kurang memahaminya. Menghadapi orang dewasa seperti warga belajar buta aksara, tidak sama dengan menghadapi anak-anak (siswa/murid). Orang dewasa sebagian besar sudah memiliki pengalaman dalam kehidupannya, sehingga proses pembelajaran lebih banyak bersifat mengarahkan dan memberi motivasi serta contoh-contoh konkrit dalam kehidupannya. Orang dewasa tidak suka digurui, tetapi menyukai pembelajaran yang menyentuh hati dan kebutuhannya.

Program pendidikan keaksaraan merupakan program antar lintas sektor, karena program ini dapat dilakukan oleh siapa saja dan lembaga mana saja, sepanjang ada niat yang rela untuk berkorban demi

orang lain. Maka koordinasi atau jaringan kerja, harus menjadi kata kunci bagi siapapun yang berminat menyelenggarakan program pendidikan keaksaraan di kelompok belajar. Program pendidikan keaksaraan menyangkut layanan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia melalui pendidikan untuk menjadi melek aksara. Dengan demikian, keberhasilan program pendidikan keaksaraan akan sangat tergantung dari keberhasilan menciptakan jaringan kerja dan memberdayakannya.

Pembinaan terhadap implementasi program pendidikan keaksaraan sudah berlangsung, dan sudah sesuai yang diharapkan yaitu pembinaan secara berjenjang sesuai tugas dan fungsi serta kewenangan dari masing-masing aparat pembina. Unsur pembina di tingkat kabupaten (Kabid PLS/ Seksi Dikmas) melakukan pembinaan kepada para penilik Dikmas, dalam upaya memberikan penguatan dan menambah kompetensi sebagai pembina pendidikan nonformal (Pendidikan Keaksaraan) di wilayah kecamatan binaannya.

Dalam proses berlangsungnya program pembelajaran, tentunya harus terus dipantau dan diberikan bimbingan teknis operasional, karena suatu program yang diharapkan dapat berjalan sesuai rencana, tidak menutup kemungkinan di tengah perjalanannya mengalami berbagai kendala, sehingga pembinaan yang terencana, terprogram dan insidental harus dilakukan oleh pihak pembina. Pembinaan dapat dilakukan oleh para pembina diminta atau tidak diminta, karena tugas pembinaan merupakan tugas yang harusnya melekat pada

diri aparat/ petugas pembina secara berjenjang.

Penilaian yang dilakukan untuk mendapatkan data/ informasi yang berkaitan dengan keberhasilan program pendidikan keaksaraan, nampaknya sudah dilakukan, dimana hasilnya telah menunjukkan bahwa indikator terlaksananya pembelajaran warga belajar di tingkat kelompok belajar telah berjalan. Gambaran yang diperlihatkan hanya sebatas pada terlaksananya pembelajaran, namun belum ditunjukkan frekuensi rata-rata pertemuan tatap muka yang dilakukan tutor dengan warga belajar, hal ini penting untuk diungkapkan karena semakin banyak terjadi pertemuan tatap muka, maka semakin banyak pula interaksi edukatif terjadi dengan materi keaksaraan yang lebih banyak dan mendalam.

Hasil penilaian terhadap kemampuan keaksaraan warga belajar ditemukan bahwa terdapat 61,60% telah memiliki tingkat kemampuan yang tinggi, dengan kata lain tuntas buta aksara secara baik, jika memakai indikator kurikulum keaksaraan dasar. Gambaran ini masih memperhatikan, karena harapan yang dicanangkan pemerintah memberantas buta aksara secara cepat dan tepat sasaran belum bisa diwujudkan dengan baik. Seharusnya program pendidikan keaksaraan setiap tahun memiliki luaran yang berkualitas, yaitu mampu menuntaskan buta aksara bagi warga belajar sasaran dalam kategori tinggi, sehingga luaran tersebut tidak berpotensi menjadi buta aksara kembali. Hal tersebut, dapat menjadi petunjuk atau dasar agar dapat menelusuri secara luas

dan mendalam apa yang menjadi kendala utama dalam proses pembelajaran. Patut diduga bahwa proses transfer ilmu yang kurang berjalan lancar, memerlukan kiat dan strategi pembelajaran yang lebih bervariasi, mengingat bahwa warga belajar pendidikan keaksaraan pada umumnya orang dewasa, dimana memerlukan strategi dan pendekatan tersendiri dalam melayani pendidikannya, yang berbeda dengan anak atau siswa di sekolah.

Pelaksanaan program pendidikan keaksaraan, tidak terlepas dari berfungsinya semua komponen yang terkait, pembiayaan, mekanisme pelaksanaan, tutor, fasilitas (sarana dan prasarana), warga belajar, penilaian dan pelaporan. Kaitan dengan hasil penelitian ini, yang menemukan bahwa pembiayaan lambat dicairkan, tutor yang kurang memiliki kemampuan membelajarkan orang dewasa, dan kekurang aktifan warga belajar mengikuti kegiatan tatap muka pembelajaran.

Dilihat dari sisi keterlaksanaan program pembelajaran, maka partisipasi tutor dan warga belajar sangat menentukan. Oleh sebab itu, tutor harus memiliki kemampuan mengajar dan mendidik yang baik, apalagi menghadapi warga belajar buta aksara yang rata-rata orang dewasa. Knowless (1973), mengemukakan empat konsep dasar dalam andragogi yang membedakan dengan paedagogi, yaitu (a) persepsi diri atau self concept, (b) pengalaman hidup yang lebih banyak, (c) kesiapan belajar, dan (d) perspektif atau orientasi waktu.

Tutor sebagai pengajar atau pendidik orang dewasa harus

memiliki kemampuan tentang berbagai strategi, pendekatan, dan metode pembelajaran orang dewasa. Kemampuan tutor dapat ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan, mengikuti seminar dan workshop pembelajaran. Pemberian peluang dan membangun sistem pembinaan bagi tutor harus terencana dan berkesinambungan, agar para tutor di lapangan terus dapat mengasah diri dan tidak tertinggal dari perkembangan ilmu dan teknologi yang berkembang begitu cepat.

Untuk mengaktifkan warga belajar mengikuti kegiatan pembelajaran, diperlukan berbagai kiat dan kegiatan. Hal yang terpenting, adalah memberikan kesadaran kepada mereka tentang berbagai hal yang tidak bisa diakses jika mereka tetap menjadi buta aksara. Proses pemberdayaan (*empowering process*) menurut Kindervatter (1979) harus diawali dari kesadaran warga masyarakat tentang tujuan dan manfaat program pembangunan yang akan dilaksanakan. Seringkali yang terjadi bahwa program-program yang dilaksanakan, tidak direncanakan dengan baik, tidak melalui studi kelayakan. Ketika proses kegiatan berlangsung, ditemukan kelemahan dan bahkan menjadi pemicu kegagalan program. Dengan demikian, maka pelibatan semua unsur yang terkait harus dimulai dari perencanaan hingga penilaian, sehingga semua unsur merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap keberhasilan program pendidikan keaksaraan.

SIMPULAN

Dapat ditarik kesimpulan: (1) Program pendidikan keaksaraan di kabupaten Maros telah dilaksanakan melalui rangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan pembelajaran, koordinasi, pembinaan dan penilaian, serta memenuhi standar pendidikan keaksaraan dasar, (2) Program Pendidikan keaksaraan didukung oleh jajaran pemerintah daerah tingkat II, lembaga swasta dan warga buta aksara. Selain itu, masih memiliki kendala seperti keterlabatan pencairan dana penyelenggaraan dari pemerintah, kurang kemampuan tutor membelajarkan warga belajar dan kurang aktifan warga belajar mengikuti pembelajaran. (3) Hasil belajar berupa kemampuan keaksaraan yang dicapai warga belajar pendidikan keaksaraan lebih banyak berada pada tingkat capaian tinggi, dengan kata lain bahwa program pendidikan keaksaraan telah berhasil membebaskan buta aksara bagi warga buta aksara di kabupaten Maros.

REFERENSI

- BPPLSP Regional V, 2006, *Standar Kompetensi Keaksaraan (SKK)*, Makassar
- , 2006, *Model Pendidikan Keaksaraan Fungsional dengan Pendekatan Tutor BalibolaE*, Makassar
- Branch, Melville., and Ira M. Robinson, 1968, *Goals and Objectives in City Comprehensive Planning*, *Town Planning Review* no.4
- Coombs, Philip H., and Ahmed Manzoor, 1978, *Attaking*

- Rural Proverty How Nonformal Education Can Help*, Baltimore: The John Hopkin Press
- Direktorat Dikmas, 2014, *Silabus Pendidikan Keaksaraan Dasar*, Jakarta: Ditjen PAUDNI, Kemdikbud
- Gronlund, Norman E and Liin, Robert I, 1985, *Measurement and Evaluation in Teaching*, New York: Macmillan Publishing Company.
- Instruksi Presiden R.I nomor 5 tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara*, Jakarta
- ISPEI, 2010, *Kajian tentang Pendidikan Keaksaraan Fungsional di Sulawesi Selatan. laporan penelitian*, Makassar
- Kindervatter, Suzanne, 1979, *Nonformal Education As Empowering Process*, Amherst, Mass: Centre for International Education, The University of Massachusetts
- Knowles, MS, 1973, *The Adult Learner: A Neglected Species*, Houston: Gulf Publishing Co.
- Kusnadi, dkk., 2004, *Program Keaksaraan Fungsional di Indonesia*, Jakarta: Mustika Aksara
- , 2005, *Pendidikan Keaksaraan: Filosofi, Strategi, Implementasi*, Jakarta: Direktorat Dikmas Ditjen PLS Depdiknas
- M. Ali Latif, 2009, *Pembelajaran Keaksaraan Berbasis Bahasa Ibu bagi Suku Teraining di Kabupaten Bone, Laporan Penelitian*, Makassar: Lembaga Penelitian UNM
- , 2011, *Pendidikan Keaksaraan Kawasan Pesisir dan kepulauan*, Makassar: Pustaka Pena Press.
- Nurhattati Fuad, 2014, *Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat: Konsep dan Strategi Implementasi*, Jakarta: PT RadjaGrafindo Persada.
- Oktia, Titik, 2007, *Praktis Belajar Membaca, menulis dan Berhitung Keaksaraan Fungsional Tingkat Dasar*, Surabaya: Sic
- Sihombing, Umberto, 1999, *Pendidikan Luar Sekolah Kini dan Masa Depan*, Jakarta: PD. Mahkota
- , 2000, *Pendidikan Luar Sekolah: Manajemen Strategi*, Jakarta: PD. Mahkota
- Sudjana, H.D., 1991, *Pendidikan Luar Sekolah, Wawasan, Sejarah perkembangan, Falsafah, dan Teori Pendukung azas*, Bandung: Nusantara Press
- , 1992, *Pengantar Manajemen Pendidikan Luar Sekolah*, Bandung: Nusantara Press
- , 2005, *Strategi Pembelajaran Pendidikan Luar Sekolah*, Bandung: Falah Production
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 35 tahun 2006 tentang Pedoman*

*Pelaksanaan GNP-
PWB/PBA, Jakarta
Undang-Undang Dasar 1945 dan
Penjelasannya, dokumen
Negara, Jakarta*

*Undang-Undang nomor 20 tahun
2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional,
Jakarta*